

Pembinaan Mutu Dayah oleh UPTD Dayah Aceh Tenggara

Sufian Husni Salam, Abd. Mukti, Syamsu Nahar

UIN Sumatera Utara
sufianhusni@gmail.com
abdmukti@uinsu.ac.id
syamsunahar@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan dayah tidak lagi sebagai lembaga pendidikan Islam klasik di masyarakat, tetapi dayah menjadi mitra pemerintah untuk menguatkan syariat Islam agar terimplemenasi di Aceh. Hal inilah yang melahirkan lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh sebagai kepedulian pemerintah agar dayah menjadi lebih bermutu dalam sentuhan manajemen modern. Pada tahap selanjutnya lembaga BPPD Aceh berubah dan berkembang menjadi Dinas Dayah Aceh sehingga keberadaan dayah semakin mendapat perhatian pemerintah Aceh. Pada pelaksanaannya di Aceh Tenggara terjadi pengembangan lembaga dalam pembinaan pesantren. Dinas dayah di Aceh sedangkan di Kabupaten menjadi UPTD dayah. Disinilah yang menjadi pembahasan khusus terhadap pembinaan dayah Aceh, dimana UPTD Dayah Aceh Tenggara itu sendiri di bawah naungan Dinas Syariat Islam. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fonomenologi. Hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan dayah di Aceh Tenggara telah ada sejak lama, tetapi secara formal pembinaan masih pada kasi PD& Pontren. Setelah lahirnya Qanun aceh yang melahirkan Dinas Dayah maka dayah telah memiliki payung hukum. Di Aceh Tenggara dayah masih di bawah naungan UPTD Dayah yang dibawah Dinas Syariat Islam. Tetapi dalam pembinaan dayah berkoordinasi langsung terhadap Dinas Dayah Provinsi Aceh. Dalam hal ini dalam pembinaan mutu dayah Aceh Tenggara, maka UPTD Aceh Tenggara melakukan pembinaan di bidang pembinaan SDM, Kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen dan pembinaan ekonomi. Pembinaan dayah memiliki peran yang penting dalam pembentukan akhlak masyarakat, hal ini karena keberadaan dayah di tengah masyarakat dan alumni dayah merupakan bagian dari masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Mutu dayah, UPTD Aceh Tenggara

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh, konsep dayah tidak berbeda dengan pesantren di Jawa yang berperan memberikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, tentu untuk keberlangsungan dayah dalam menghadapi tuntutan zaman telah membuktikan diri mampu menjiwai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. (Subakat: 2017) Dayah dalam perspektif social masyarakat Aceh dikenal sebagai “bapak” dari pendidikan Islam yang telah melahirkan generasi umat yang membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Demikian juga dengan peran ulama dayah, bahwa dalam kultur masyarakat Aceh berperan sentral dalam merealisasikan ajaran Islam dengan menafsirkan hokum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laju perkembangan modernisasi juga menyentuh dayah di Aceh, seperti sarana dan prasarana sudah modern, sistem pembelajaran, manajemen pengelolaan lembaga yang modern, penggunaan IT dan mempelajari bahasa inggris. Di sisi lain juga dalam lingkungan dayah di Aceh di bangun lembaga pendidikan umum, sehingga di dayah memberikan dua ijazah terhadap santri yaitu ijazah dayah dan pendidikan umum. Inti utama dalam modernisasi yang menjadi pegangan utama dalam pendidikan dayah adalah rasional dan ilmiah, hal ini sebagaimana ditegaskan Madjid dan Nasution modernisasi merupakan proses perombakan pola berpikir yang irasional menjadi pola berpikir dan sikap kegiatan baru yang rasional yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. (Madjid, 1997: 172) Sentuhan modernisasi di dayah tidaklah mengubah haluan tujuan dayah, tetapi misi utama dayah tetap mengkader ulama yang mampu menjawab permasalahan kontemporer. Sikap dayah terhadap modernisasi tidaklah menolak, tetapi melihat dari segi nilai yang disampaikan sehingga dayah mampu bertahan. Hal ini dapat dilihat dayah-dayah di Aceh yang telah melakukan modernisasi, baik dalam aspek sistem pendidikan, manajerial atau memakai konsep modern dalam sistem tradisional dayah sehingga dayah tetap pada tujuan utamanya.

Keberadaan dayah hingga sekarang membuktikan bahwa dayah mampu beriringan dengan modernisasi yang memaksa untuk mengikutinya. Kemampuan dayah dalam menghadapi modernisasi tersebut dapat dilihat dari dinamika

perkembangan dayah dengan klasifikasi menjadi tiga yaitu dayah tradisional, dayah model terpadu (modern), dan dayah tahfiz. (Ashuri, 2013) Klasifikasi dayah tersebut memberikan informasi bahwa dayah sudah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern dan telah berorientasi dengan pendidikan dan fungsional serta telah berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. (Muhaimin dan Mudjib: 1993, 301) Perpektif sosial dan politik, dayah telah mengambil kedudukan penting dan telah memberi pengaruh yang sangat besar. Kejayaan dayah pada masa lalu telah mampu mendidik rakyat Aceh dalam berbagai hal. (Amiruddin:33) Kaderisasi dari dayah mampu membangun kompetensi para alumni dayah mampu menjadi raja, menteri, panglima tentera, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, perubatan, dan lain-lain. Jadi, dayah merupakan wadah pembangunan masyarakat, tempat penyampaian syiar Islam juga sebagai tempat mendidik para santri untuk perlawanan bangsa penjajah.

Lembaga pendidikan dayah dalam sebuah system akhirnya berkontribusi dan bahkan melibatkan diri bidang politik, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu maka legalitas formal terhadap pendidikan dari pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajar. Hal ini dapat dilihat dari memberlakukan syariat Islam di Aceh oleh pemerintah Aceh. Tentu dalam hal ini peran dayah sebagai lembaga pendidikan yang khusus untuk mengkaji ilmu Islam menguat kembali. Bahkan hingga sekarang keberadaan dayah tidak lagi sebagai lembaga pendidikan Islam klasik di masyarakat, tetapi dayah menjadi mitra pemerintah untuk menguatkan syariat Islam agar terimplemenasi di Aceh. Melihat kiprah dayah yang ikut aktif membangun syariat Islam di Aceh tentu dayah harus memiliki lembaga khusus agar dayah menjadi disiplin dalam manajemen agar menjadi bermutu.

Hal inilah yang melahirkan lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh sebagai kepedulian pemerintah agar dayah menjadi lebih bermutu dalam sentuhan manajemen modern. Pada tahap selanjutnya lembaga BPPD Aceh berubah dan berkembang menjadi Dinas Dayah Aceh sehingga keberadaan dayah semakin mendapat perhatian pemerintah Aceh. Pada pelaksanaannya di bawah naungan pemerintah Aceh, maksudnya di kabupaten Aceh yang secara khusus

Aceh Tenggara terjadi pengembangan lembaga dalam pembinaan pesantren. Dinas dayah di Aceh sedangkan di Kabupaten menjadi UPTD dayah. Disinilah yang menjadi pembahasan khusus terhadap pembinaan dayah Aceh, dimana UPTD Dayah Aceh Tenggara itu sendiri di bawah naungan Dinas Syariah Islam. Untuk jumlah dayah di Aceh Tenggara pada tahun 2022 terdapat 49 dayah sehingga peran UPTD Dayah Tenggara sangat kompleks.

Berdasarkan hal ini maka untuk dapat merealisasikan hal tersebut Dinas Dayah sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan. Di sinilah peran UPTD Dayah Aceh Tenggara untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah melalui pembinaan oleh UTPD Dayah itu sendiri. Pembinaan terhadap dayah tentu menghadapi berbagai problema yang dihadapi oleh dayah yang perlu di pecahkan. Hal ini karena SDM dayah tidaklah semuanya alumni pendidikan formal, jadi baik secara kebetulan atau secara terpaksa ia menghadapi masalah yang sama atau hampir sama yang memerlukan pemecahan terhadap masalah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk meneliti pembinaan mutu oleh UPTD Dayah Aceh Tenggara terhadap dayah di Aceh Tenggara. Maka dalam hal ini maka peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*. Metode ini disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiono: 2018, 8) Pendekatan ini diperlukan untuk memahami efektifitas suatu program dengan hasil yang dicapai, yaitu manfaat akhir dari suatu usaha dari waktu ke-waktu, seperti adanya kebijakan-kebijakan pembinaan dayah.

Adapun untuk menganalisis data dan bahan kajian akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana suatu kebijakan untuk tujuan pengembangan pendidikan diharuskan untuk memulai hasil dalam aplikasinya, sehingga memberi efek kepada berhasilnya pendidikan dayah. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. (Satori dan Komariah: 2014, 22)

Data-data yang diperoleh dari proses pengambilan data dari teknik penelitian

yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan tiga tahapan. Adapun tahapan tersebut meliputi pendahuluan, tahap penyaringan, dan tahap melengkapi data jika data yang dirpoleh masih belum maksimal. Pada proses yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengecekan keabsahan data, hal ini dilakukan karena data yang diperoleh ketika melakukan penyaringan data adalah banyak. Oleh karena itu maka data yang diperoleh tentu tidak semua relevan atau data yang diperoleh disaring yang paling abash untuk menjawab permasalahan penelitian. dengan demikian jika data tersebut masih banyak maka dilakukan penyaringan lagi di lapangan agar data yang dirpoleh validitasnya tinggi

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Lembaga Pembinaan Dayah Aceh Tenggara

Pembinaan terhadap dayah pada awalnya sebelum lahirnya Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, pengelolaan dayah berada di bawah kemenag provinsi dan kabupaten kota. Seksi yang membidangi tentang dayah adalah seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren (PD & Pontren). Seksi PD & Pontren tersebut menekankan pada penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan alQuran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Realitas kehidupan masyarakat Aceh secara umum dalam dinamika perjalanan kehidupannya, keberadaan sejarah masa lalu memberikan acuan dasar atau pedoman bagi setiap masyarakat agar memberikan arahan untuk menata kehidupannya. Bagi masyarakat Aceh bahwa sejarah telah mencatat beberapa kerajaan dan kesultanan yang membangun peradaban Aceh merupakan system pemerintahan yang didasari nilai-nilai Islam. Hal inilah yang menjadikan Aceh dengan sebutan Serambi Mekah, pada perkembangan selanjutnya Aceh melekat dengan Islam yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Aspek yang melekat hingga sekarang adalah sosial budaya dan pendidikan yang dikenal

dengan Dayah. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh, konsep dayah tidak berbeda dengan pesantren di Jawa yang berperan memberikan ajaran Islam kepada masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, tentu untuk keberlangsungan dayah dalam menghadapi tuntutan zaman telah membuktikan diri mampu menjiwai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia (Subakat:2017).

Fungsi tersebut pada dasarnya hanya menekankan pada pembinaan dan bimbingan secara teknis. Sedangkan pada kewenangan untuk pembangunan fisik berupa bantuan sarana dan prasarana dayah/ pesantren masih belum bagian yang mengawasi hal tersebut. Maka hal inilah yang mendasari lahirnya Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Salah satu buah dari UUPA lainnya adalah lahirnya badan pembinaan pendidikan daya Aceh (BPPD) atau yang dikenal dengan badan dayah, yang saat ini sudah berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA). BPPD berdiri pada tahun 2008 berdasarkan UUPA No 11 tahun 2006, Qanun No 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tatakerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam serta Qanun No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh. (Komar: 2006, 132) Hadirnya dinas dayah menjadi kekuatan bagi dayah atau pesantren di Aceh, dayah kembali menjalankan pendidikannya menata kembali kurikulum, meningkatkan kualitas, baik itu pembangunan maupun tenaga sumber daya manusia. Ada 7 program prioritas utama dalam pembinaan dayah ini antara lain:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan dayah
- 2) Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah
- 3) Program pemberdayaan santri Aceh
- 4) Program pembinaan manajemen dayah
- 5) Pemberdayaan ekonomi dayah
- 6) Program pengembangan teknologi informasi dan perpustakaan dayah
- 7) Penelitian dan pengembangan dayah

Berdasarkan hal tersebut maka dengan terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah Aceh, maka kedudukan dayah di Aceh sama dengan pendidikan umum yang

berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh dan madrasah yang berada di bawah kanwil Kemenag Aceh. Kesamaan kedudukan ini dalam hal legalitas ijazahnya, dan dari segi anggarannya. Tindak lanjut dari qanun no 13 tahun 2016, pihak legislatif menyusun qanun nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Aceh provinsi dan kabupaten/kota memiliki Sembilan bidang yang menjadi kewewenangannya. Kesembilan bidang tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut: (Qanun Aceh 2018)

1. Bidang kebijakan; menetapkan renstra pendidikan Dayah Aceh, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menetapkan standar mutu pendidikan dayah, melaksanakan pengawasan, evaluasi mutu pendidikan dayah, memfasilitasi pendirian ma'had Aly dan menyokong sumber daya terhadap penyelenggaraan ma'had Aly.
2. Bidang pembiayaan
3. Bidang Kurikulum dan pengajaran;
4. Bidang prasarana dan sarana;
5. Untuk pembinaan SDM;
6. Bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan;
7. Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil,
8. Bidang Kerjasama;
9. Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan wewenang Dinas Pendidikan Dayah tersebut, maka pendidikan Dayah memiliki berbagai kebijakan dalam pengemangan dayah tersebut. Hal ini berarti secara formal penyelenggaraan pendidikan dayah sama halnya dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan resmi lainnya. Oleh karena itu maka lembaga pendidikan Dayah terus berkoordinasi dengan pemerintah dan sebaliknya dalam pengembangan dayah agar berjalan secara efektif dan efisien.

Dayah yang merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, dalam hal ini maka peran dayah untuk membentuk karakter dan akhlak masyarakat serta mendidik generasi muda menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah agar generasi muslim mampu menjadi banteng untuk menghadapi

globalisasi.(Puteh: 2012, 189) Maka dalam hal ini Dayah dalam pelaksanaannya dan pengelolaannya dipimpin oleh seorang ulama yang memiliki keilmuan dan dalam dan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Selanjutnya peran ulama adalah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan tujuan agar para santri dapat diharapkan sebagai estafet untuk menyiarkan Islam (Abbas: 2007, xii)

Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat yang menghibahkan dirinya untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah saw. dan dari sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah saw. tujuannya adalah agar para sahabat tersebut menjadi modal untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah. (Ishaq: 2010, 54). Sejarah telah menceritakan berbagai informasi tentang pendidikan dayah, bahwa institusi dayah telah lama berkiprah sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini untuk mengkader para intelektual muslim. (Muhammad: 2020, 1) berdasarkan hal ini maka sebagai lembaga pendidikan Islam klasik, dayah memiliki identitas keislaman dan keaslian budaya Aceh berbasis tradisional. (Madjid: 1997, 3) Dengan tuntutan dinamika Kondisi social kehidupan masyarakat yang telah bayak melahirkan alumni bahwa dayah mambpu memberikan hal positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Manfred: 1983, 98) Selanjutnya dalam dinamika kehidupan masyarakat bahwa dengan tuntutan social masyarakat yang semakin kompleks menuntut dayah untuk mampu menjawab tuntutan tersebut. Berdasarkan hal ini maka dayah dikelompokkan kepada tiga tipe berdasar kan klasifikasi dari UU Dayah Aceh yaitu tradisional, dayah tahfiz dan dayah terpadu.

2. Pembinaan UTPD Aceh Tenggara dalam Pembinaan Mutu Dayah

Keberadaan dayah di Aceh Tenggara telah mencapai 51 dayah, tentu hal ini merupakan tugas berat bagi UPTD Aceh Tenggara dalam membina dayah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam tugas Dinas Dayah Aceh bahwa salah satunya pada bidang kebijakan. Dalam hal ini Dinas Dayah menetapkan renstra pendidikan Dayah Aceh, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menetapkan standar mutu pendidikan dayah, melaksanakan pengawasan, evaluasi mutu pendidikan dayah, memfasilitasi pendirian ma'had Aly dan menyokong sumber daya terhadap penyelenggraan ma'had Aly.

Ketika pemerintah berkiprah dalam kebijakan dalam penyelenggaraan dayah, persoalan politik akan mejadi pembahasan utama dalam pemerintahan terhadap dayah. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam lembaga tersebut berkecimpung dan terlibat berbagai elemen. Aceh itu sendiri merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai ras, etnik, budaya, agama, golongan sosial ekonomi bahkan dari sisi pandangan politik. Terbentuknya hubungan yang harmonis sangat penting dalam hal ini agar pertautan ajaran Islam dengan masyarakat dan pemerintah terbina dengan baik. Terkhusus di Aceh tenggara bahwa social masyarakat yang majemuk menjadikan peran lembaga pendidikan dayah menjadi ganda. (Armia: 2014, 13) Oleh karena itu, eksistensi dayah tidak lagi hanya untuk mendidik santri tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. (Lubis: 2010)

Berdasarkan hal ini maka, pimpinan dayah akhirnya berkiprah dalam berbagai kehidupan social masyarakat hingga perannya dalam perpolitikan sebagai wujud keikutsertaan dalam membangun kemajuan dayah dan perannya dimasyarakat. (Rozaqi: 2004, 47) Secara system, pimpinan dayah memiliki peran sentral perkembangan dayah sehingga maju mundurnya dayah tergantung bagaimana konsep berpikir pimpinan dayah dalam mengembangkan dayah. (Lubis: 2007, 169) Maka hampir diberbagai instansi pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di lakoni oleh teungku dayah. Tentu hal ini menarik, tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki peran yang kuat terhadap pembinaan pendidikan dayah.

Dalam hal ini pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Tenggara misalnya, kontribusi Pemerintah Daerah serta peran Kemenag dalam rangka pembinaan dan pengembangan program sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Bahkan ada sebagian dayah, peran pimpinan dayah tidak/kurang dapat menyentuh sosio kultural masyarakat Aceh Tenggara, karena ada sebahagian pimpinan dayah bukan atau tidak berlatar belakang pendidikan local Aceh akan tetapi dari alumni Timur Tengah. Perkembangan gerakan-gerakan yang mengatas namakan keagamaan di Aceh sebahagiannya membuat kekhawatiran masyarakat akan pentingnya

kehadiran para ulama berberjasama dengan pemerintah untuk menentang pergerakan mereka. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembinaan dayah dan peran pemerintah tentang dayah dalam hal ini adanya kesinergisan antara pemerintah melalui Dinas Dayah dan Kemenag. (Basyah: 1987, 222)

Lembaga pendidikan secara umum merupakan penyokong utama dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditandai dari kemajuan dan keberhasilan pendidikan bangsa itu sendiri. Artinya lembaga pendidikan berperan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya suatu daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai lembaga pendidikan yang ada di tanah air, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara Nasional, Indonesia mempunyai peran khusus dalam pengelolaan lembaga pendidikan, dengan demikian Indonesia akan memiliki manusia-manusia terdidik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengabaikan iman dan takwa sebagai landasan intelektual generasi penerus mereka.

Selanjutnya, keberadaan Dinas Dayah Aceh melalui UPTD Dyah Aceh Tenggara maka sarana dan prasarana lembaga pendidikan dayah menjadi perhatian pemerintah. Peningkatan ini penting dilakukan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dayah yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam peningkatan sarana dan prasarana ini, maka dijabarkan beberapa program diantaranya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah. Ada beberapa pembinaan yang dilakukan UPTD Dayah Aceh Tenggara dalam meningkatkan mutu dayah diantaranya:

1. Pembinaan guru dan santri, pembinaan ini meliputi proses pembinaan pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah; maka dalam hal ini pelaksanaan terhadap pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Dayah/guru kontrak Dayah sesuai dengan ketentuan; Memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dayah.

2. Pembinaan sarana dan prasarana, pada pembinaan ini UPTD Dayah Aceh Tenggara Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan Menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Aceh.
3. pembinaan manajemen dayah program ini dimaksudkan memberikan pengetahuan manajerial kepada para tengku-tengku pimpinan dayah dalam pengelolaan pendidikan dayah, manajerial keuangan dayah dan administrasi dayah. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi kegiatan pelatihan manajemen dayah, kegiatan pelatihan pengembangan silabus dan kurikulum dayah, kegiatan legalisasi dan sertifikasi kepemilikan tanah dayah, kegiatan pelatihan aset manajemen dayah, kegiatan evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan dayah, kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah, kegiatan bantuan modal pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kegiatan pelatihan sistem peratur santri.
4. Pemberdayaan ekonomi dayah program ini dimaksudkan untuk penguatan-penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi dayah dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri. Program ini meliputi pelatihan ekonomi dayah produktif.
5. Program pengembangan teknologi informasi dan perpustakaan dayah program ini dimaksudkan untuk pengembangan pendidikan melalui teknologi (e-learning) dan media pembelajaran. Program ini mencakup kegiatan penyusunan database dayah, kegiatan penerbitan berkala majalah atau jurnal dayah, kegiatan penyediaan alat bantu proses belajar mengajar di dayah, kegiatan pengelolaan website BPP dayah.

Sinergitas UPTD Dayah Aceh Tenggara dan Dayah Aceh Tenggara sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian dari masyarakat harus mampu mengkonstruksi solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ajaran Islam tersebut berjalan secara dinamis dan transformatif untuk membangun ketertinggalan umat Islam agar berpengetahuan dan berakhlak (Amin: 2009,224). Keberadaan Dayah di Aceh Tenggara sangat penting sebagai upaya mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan juga untuk menjaga akidah anak-anak yang tinggal di wilayah tersebut. Dayah harus bisa menjadi basis pendidikan agama Islam yang mampu menyatukan berbagai etnis suku agar tidak terjadi konflik. Di sinilah pentingnya pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis inklusif, dalam pelaksanaannya agar melahirkan santri yang berakhlak dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, dayah-dayah di Aceh Tenggara selalu berupaya agar mampu mengayomi santri dengan berbagai suku tersebut. Pada dasarnya keberadaan Dayah di Aceh, sangat berbeda dengan dayah Di Aceh Tenggara maka penyelenggaraan pendidikan dayah juga memiliki ciri khas tertentu.

Pada dasarnya secara kelembagaan, Dayah sebagai wadah pembentukan akhlak santri melalui tauladan dengan mengaktualisasikan semangat penanaman nilai-nilai Islam pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru dayah. Dayah awalnya dikenal sebagai institusi sosial agama yang dalam pendidikan dan dakwah, dayah juga berperan dalam ranah sosial-politik dan amat strategis untuk berperan dalam pencegahan perekonomian yang tidak sehat. Di sinilah peran dakwah bi al hal dalam berbagai kegiatan dengan tujuan menjadikan Islam berkiprah dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dayah oleh UPTD Dayah Aceh Tenggara yang berupaya menjadikan Dayah sebagai miniatur masyarakat sehingga alumni dayah mampu berkiprah di masyarakat

D. KESIMPULAN

Keberadaan dayah di Aceh Tenggara telah ada sejak lama, tetapi secara formal pembinaan masih pada kasi PD& Pontren. Setelah lahirnya Qanun aceh yang melahirkan Dinas Dayah maka dayah telah memiliki payung hukum. Di Aceh Tenggara dayah masih di bawah naungan UPTD Dayah yang dibawah Dinas Syariat Islam. Tetapi dalam pembinaan dayah berkoordinasi langsung terhadap Dinas Dayah Provinsi Aceh. Dalam hal ini dalam pembinaan mutu dayah Aceh Tenggara, maka UPTD Aceh Tenggara melakukan pembinaan di bidang pembinaan SDM, Kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen dan pembinaan ekonomi. Pembinaan dayah memiliki peran yang penting dalam pembentukan akhlak masyarakat, hal ini karena keberadaan dayah di tengah masyarakat dan alumni dayah merupakan bagian dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashuri, "Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah," Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, VOL. XIII, No. 2 Februari 2013
- Amiruddin, M. Hasbi. *Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008
- Abbas, Shahrizal *Dalam Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- AR, Muhammad *Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Kemenag RI, 2010
- Armia, Nirzalin "Teungku Dayah Dan Kekuasaan Panoptik," dalam *Substantia*, Vol. 16, No. 1, April 2014
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Basyah, Mohd. *Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah*, Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh, Persatuan Dayah Inshafuddin, tahun 1987
- Ishaq, Ibrahim "Apresiasi terhadap Peranan Dayah dalam Pembinaan Masyarakat di Sekitarnya" dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010
- Lubis, Saiful Akhyar "Konseling Islami Dan Pendidikan Mental" dalam jurnal *MIQOT* Vol. XXXIV No. 1, 2010
- Lubis, Saiful Akhyar *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997

- Madjid, Nurcholish Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997
- Muhaimin & Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Agama Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993
- Puteh, M. Jakfar, *Eksistensi Dayah Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, dalam M.Hasbi Amiruddin, *Dayah Di Tahun 2050 Menatap Masa Depan Dayah Dalam Era Transformasi Ilmu dan Gerakan Keagamaan*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Hexagon, 2013
- Rahayu Subakat, “Peranan Dayah dan Meunasah di Aceh Dalam Membentuk Masyarakat Religius” *Jurnal As-Salam* Vol. 1 No. 13. (2017).
- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Madura: Pustaka Marwa, 2004
- Tim Penyusun, *Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun 2018*, Banda Aceh, 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. 21*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga. 2006
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1983